

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh sektor pariwisata dan faktor ekonomi terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Teori-teori yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan masing-masing variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel dependen.

pembahasan dalam sub-bab ini dimulai dengan teori yang menjelaskan peran sektor tersier dalam pembangunan ekonomi, yaitu Teori Tiga Sektor dari Colin Clark. Selanjutnya, diuraikan konsep PDRB sektor akomodasi dan makan minum serta teori nilai tambah dari Sir Richard Stone untuk mengukur kontribusi sektor tersebut. Kemudian, dijelaskan Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) yang menjadi dasar pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, masing-masing komponen sektor pariwisata yang meliputi jumlah wisatawan, jumlah hotel berbintang, dan jumlah restoran dibahas secara terpisah. Terakhir, diuraikan faktor-faktor ekonomi yang meliputi pendapatan per kapita dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) beserta teori-teori yang melandasinya, yaitu Hukum Engel dan Teori Upah Minimum dari Mankiw.

2.1.1 Teori Tiga Sektor (Colin Clark)

Teori tiga sektor (*three- hypothesis*) pertama kali diperkenalkan oleh Colin Clark dalam bukunya *The Conditions of Economic Progress* (1940). Clark mengamati bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terjadi pergeseran yang sistematis dalam komposisi tenaga kerja dan output ekonomi dari satu sektor ke sektor lainnya. Berdasarkan pengamatannya terhadap berbagai negara di dunia, Clark membagi aktivitas ekonomi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan utilitas), serta sektor tersier (jasa-jasa seperti perdagangan, transportasi, keuangan, akomodasi, dan restoran).

Inti dari teori Clark adalah bahwa proses pembangunan ekonomi ditandai oleh pergeseran dominasi dari sektor primer ke sektor sekunder, dan selanjutnya dari sektor sekunder ke sektor tersier. Pada tahap awal pembangunan, sebagian besar penduduk bekerja di sektor primer. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan kemajuan teknologi, tenaga kerja dan output kemudian beralih ke sektor sekunder. Selanjutnya, ketika pendapatan per kapita terus meningkat dan kebutuhan akan layanan jasa semakin kompleks, sektor tersier tumbuh menjadi yang terbesar dalam perekonomian (Clark, 1940). Pergeseran struktural ini bukan hanya fenomena nasional, tetapi juga dapat diamati pada tingkat regional seperti provinsi atau kabupaten/kota. Teori Clark memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini. Sektor akomodasi dan makan minum merupakan bagian integral dari sektor tersier.

Pertumbuhan sektor ini mencerminkan meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkembangnya aktivitas pariwisata. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah dan semakin ramai kunjungan wisatawan, semakin besar permintaan terhadap jasa akomodasi dan makan minum, yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB sektor tersebut. Dengan demikian, teori tiga sektor Clark menjadi fondasi teoretis yang menjelaskan mengapa sektor akomodasi dan makan minum memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian Jawa Barat, terutama seiring dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat dan sektor pariwisata.

2.1.2 PDRB sektor Akomodasi dan makan minum

Sektor PDRB akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari sektor jasa yang mencakup kegiatan penyediaan tempat menginap serta penyediaan makanan dan minuman siap konsumsi. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI), sektor ini mencakup usaha penyediaan akomodasi seperti hotel, motel, losmen, villa, serta usaha penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, kafe, bar, kantin, dan jasa boga atau catering (BPS, 2024).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor akomodasi dan makan minum adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor ini dalam satu tahun. PDRB mencerminkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian regional (BPS, 2024). Dalam penelitian ini, PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y) digunakan sebagai indikator kinerja sektor tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB, semakin baik kinerja sektor ini.

Faktor-faktor yang memengaruhi PDRB sektor ini antara lain jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah pelaku usaha makanan dan minuman, pendapatan per kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

2.1.2.1 Teori Nilai Tambah Sektor Jasa (Sir Richard Stone)

Konsep nilai tambah sektor jasa dalam penelitian ini mengacu pada kerangka Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts – SNA*) yang dikembangkan oleh Sir Richard Stone, peraih Nobel Ekonomi tahun 1984. Stone (1984) mendefinisikan nilai tambah bruto sebagai selisih antara total output (nilai produksi) suatu unit usaha dengan total biaya antara (bahan baku, energi, dan jasa pendukung) yang digunakan dalam proses produksi. Definisi ini menjadi fondasi bagi penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks sektor akomodasi dan makan minum, outputnya adalah pendapatan dari penyediaan jasa penginapan (hotel) serta makanan dan minuman (restoran, kafe, katering), sementara biaya antaranya meliputi bahan makanan, listrik, air, dan jasa kebersihan. Nilai tambah yang tercipta dari selisih tersebut kemudian terdistribusi sebagai upah tenaga kerja, laba usaha, dan pajak daerah.

PDRB sektor akomodasi dan makan minum, yang secara konseptual merupakan akumulasi nilai tambah dari seluruh unit usaha di sektor tersebut di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah wisatawan (X1), jumlah hotel (X2), dan jumlah pelaku usaha makanan dan minuman (X3), maka semakin besar output yang dihasilkan, yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah sektor ini.

Demikian pula, peningkatan pendapatan per kapita (X4) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (X5) akan memperbesar daya beli masyarakat terhadap jasa akomodasi dan kuliner, sehingga turut mendorong nilai tambah sektor tersebut. Teori nilai tambah sektor jasa dari Sir Richard Stone menjadi fondasi teoretis bahwa setiap peningkatan variabel independen berpengaruh positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum.

2.1.3 Kinerja Sektor Akomodasi dan makan minum

Kinerja sektor akomodasi dan makan minum dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan sektor tersebut dalam menghasilkan output ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. PDRB merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor ini dalam satu tahun, yang mencerminkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian regional (BPS, 2024). Semakin tinggi nilai PDRB, semakin baik kinerja sektor akomodasi dan makan minum di suatu wilayah.

Berdasarkan teori nilai tambah yang dikembangkan oleh Sir Richard Stone (1984), PDRB suatu sektor dihitung sebagai selisih antara total output (pendapatan kotor usaha) dengan total biaya antara (bahan baku, energi, dan jasa pendukung). Dalam konteks sektor akomodasi dan makan minum, outputnya berasal dari pendapatan hotel (penjualan kamar, restoran hotel, room service) serta pendapatan restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga. Semakin besar permintaan terhadap jasa ini, semakin besar output yang dihasilkan, dan semakin tinggi nilai tambah yang tercermin dalam PDRB.

2.1.3.1 Indikator Kinerja Sektor akomodasi dan makan minum

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor akomodasi dan makan minum dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. PDRB didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu sektor dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun (BPS, 2024). Konsep ini sejalan dengan kerangka Sistem Neraca Nasional yang dikembangkan oleh Sir Richard Stone (1984), di mana nilai tambah bruto dihitung sebagai selisih antara total output (pendapatan kotor usaha) dengan total biaya antara (bahan baku, energi, dan jasa pendukung). Pemilihan PDRB sebagai indikator kinerja didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, PDRB secara komprehensif mencerminkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian regional (Tambunan, 2014).

Kedua, data PDRB tersedia secara konsisten dari tahun ke tahun untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga memungkinkan analisis time series dan cross section (BPS, 2024). Ketiga, PDRB telah menjadi indikator baku dalam studi-studi ekonomi regional untuk mengukur kinerja sektoral (Sukirno, 2015). Semakin tinggi nilai PDRB sektor ini, semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya. Data PDRB sektor akomodasi dan makan minum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, dengan satuan miliar rupiah. Periode data mencakup tahun 2021 hingga 2025 untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dengan menggunakan indikator ini, penelitian dapat menganalisis sejauh mana variabel jumlah wisatawan (X1), jumlah hotel berbintang (X2), jumlah restoran (X3), pendapatan per kapita (X4), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (X5) memengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

kinerja sektor akomodasi dan makan minum yang diukur dengan PDRB dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor permintaan (*demand-side factors*) dan faktor penawaran (*supply-side factors*). Faktor permintaan mencakup variabel-variabel yang memengaruhi volume konsumsi masyarakat terhadap jasa akomodasi dan kuliner, sedangkan faktor penawaran mencakup variabel yang memengaruhi ketersediaan kapasitas produksi dan distribusi jasa tersebut (Tambunan, 2014).

Faktor permintaan dalam penelitian ini diwakili oleh jumlah wisatawan (X1), jumlah restoran (X3), pendapatan per kapita (X4), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (X5). Jumlah wisatawan mencerminkan permintaan eksternal yang berasal dari pengunjung daerah. Berdasarkan Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH), setiap peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa akomodasi (hotel) dan kuliner (restoran, kafe) (Balaguer & Cantavella-Jordá, 2002). Wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat membutuhkan tempat menginap dan makanan selama perjalanan, sehingga permintaan ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan hotel dan restoran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap PDRB sektor tersebut (Tribe, 2011).

Restoran juga berperan sebagai konsumen akhir (*end user*) dari produk makanan dan minuman. Peningkatan jumlah restoran akan meningkatkan permintaan terhadap bahan baku dan produk jadi dari industri tersebut. Selain itu, persaingan antar restoran mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk, yang akhirnya berdampak positif pada sektor akomodasi dan makan minum secara keseluruhan (Pine & Gilmore, 1999).

Pendapatan per kapita dan UMK mencerminkan daya beli masyarakat lokal. Keynes (1936) dalam Teori Konsumsinya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan disposabel dengan tingkat konsumsi. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi terhadap barang dan jasa, termasuk makanan dan minuman, juga akan meningkat. Hukum Engel (Engel, 1857) menambahkan bahwa meskipun proporsi pengeluaran untuk makanan menurun seiring peningkatan pendapatan, konsumsi makanan dan minuman justru meningkat, dan masyarakat cenderung mengonsumsi produk dengan kualitas yang lebih baik dan lebih bervariasi. Sementara itu, Mankiw (2018) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum yang tepat dapat menstimulasi permintaan domestik karena adanya jaminan pendapatan bagi kelompok masyarakat kelas pekerja.

Faktor penawaran dalam penelitian ini diwakili oleh jumlah hotel (X2). Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai saluran distribusi utama bagi produk makanan dan minuman. Setiap hotel membutuhkan pasokan bahan makanan untuk operasional dapur, restoran hotel, layanan kamar (*room service*), serta fasilitas *banquet* dan *catering* karena hotel menciptakan permintaan turunan (*derived demand*) terhadap produk makanan dan minuman.

Antara dan Sumarniasih (2017) menyatakan bahwa peningkatan aktivitas pada sektor akomodasi secara langsung akan menstimulasi produktivitas makanan dan minuman lokal. Semakin banyak hotel yang tersedia, semakin besar potensi penyerapan produk makanan dan minuman oleh sektor pariwisata.

2.1.4 Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH)

Teori *Tourism-Led Growth Hypothesis* (TLGH) merupakan salah satu kerangka teoretis yang penting dalam ekonomi pariwisata. Hipotesis ini menyatakan bahwa sektor pariwisata berperan sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Balaguer & Cantavella-Jordá, 2002). Dalam perspektif ini, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rekreasi, tetapi sebagai sektor strategis yang mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya, termasuk perdagangan, transportasi, konstruksi, serta sektor akomodasi dan makan minum.

Mekanisme kerja TLGH dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan mendorong peningkatan terhadap permintaan barang dan jasa local, termasuk Makanan dan Minuman. Hal ini akan menciptakan dampak ekonomi langsung di destinasi wisata.
2. Peningkatan permintaan tersebut akan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi lebih lanjut, baik oleh pekerja yang menerima upah maupun pemilik usaha.

Setiap tahapan di atas berkontribusi terhadap peningkatan nilai produksi dan jumlah unit usaha industri mamin. İlban dan Liceli (2022) menemukan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman. Artinya, peningkatan sektor pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga secara spesifik meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum. Sebaliknya, peningkatan kinerja sektor akomodasi dan makan minum juga dapat menarik lebih banyak wisatawan melalui pengembangan wisata kuliner.

Relevansi TLGH dengan penelitian ini terletak pada penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel pariwisata secara teoretis memengaruhi PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Dalam kerangka TLGH, peningkatan jumlah wisatawan (X1) akan meningkatkan permintaan terhadap jasa akomodasi (hotel) dan kuliner (restoran, kafe). Permintaan yang meningkat ini akan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas, yang tercermin dalam peningkatan jumlah hotel berbintang (X2) dan jumlah restoran (X3). Pada akhirnya, peningkatan aktivitas di ketiga sektor ini akan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y).

Dengan demikian, TLGH memberikan justifikasi teoretis bahwa secara parsial dan simultan, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh positif terhadap Y di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2021–2025.

2.1.5 Komponen Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki beberapa komponen utama yang secara langsung terkait dengan konsumsi jasa akomodasi dan makan minum. Dalam penelitian ini, komponen tersebut meliputi jumlah wisatawan, jumlah hotel berbintang, dan jumlah restoran. Ketiga komponen ini berperan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y) di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

2.1.5.1 Jumlah Wisatawan

Wisatawan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke luar lingkungan tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau kepentingan lainnya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun (UNWTO, 2023). Jumlah wisatawan merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat permintaan terhadap aktivitas pariwisata di suatu destinasi. Menurut Tribe (2011), pengeluaran wisatawan selama perjalanan menciptakan dampak ekonomi langsung terhadap sektor-sektor yang berkaitan, termasuk akomodasi (hotel) serta makanan dan minuman (restoran, kafe). Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, semakin besar pula permintaan terhadap jasa akomodasi dan kuliner, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha dan kontribusi terhadap PDRB sektor tersebut.

Menurut Tribe (2011), pengeluaran wisatawan selama melakukan perjalanan akan menciptakan dampak ekonomi langsung terhadap sektor yang berkaitan seperti akomodasi, serta makanan dan minuman. Selain dampak langsung, pengeluaran tersebut juga menimbulkan efek lanjutan berupa

peningkatan produksi, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan juga mendorong produk makanan dan minuman. Pelaku usaha akan berusaha menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan preferensi wisatawan yang beragam, sehingga mendorong inovasi dalam hal rasa, penyajian, maupun jenis produk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak hanya memengaruhi kuantitas permintaan, tetapi juga kualitas dan variasi produk.

2.1.5.2 Jumlah Hotel Berbintang

Hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi yang menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Bukan hanya untuk menginap, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan yang mendukung kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata. Hotel berbintang merupakan salah satu bentuk akomodasi yang menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan dengan standar pelayanan tertentu. Klasifikasi hotel berbintang umumnya dibagi menjadi bintang satu hingga bintang lima berdasarkan fasilitas dan kualitas pelayanan yang diberikan. Peran hotel dalam mendorong PDRB sektor akomodasi dan makan minum tidak hanya terbatas pada penyediaan jasa menginap, tetapi juga sebagai pusat kegiatan konsumsi makanan dan minuman.

Wisatawan yang menginap di hotel umumnya mengonsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran hotel, layanan kamar (*room service*), atau fasilitas *banquet* dan *catering*. Hal ini menciptakan permintaan langsung terhadap sektor penyediaan makan minum. Antara & Sumarniasih (2017) menyatakan

bahwa peningkatan aktivitas pada sektor akomodasi secara langsung akan menstimulasi produktivitas sektor makanan dan minuman lokal. Pengaruh jumlah hotel berbintang terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum.

Pengaruh jumlah hotel berbintang terhadap sektor akomodasi dan makan minum dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Setiap hotel membutuhkan pasokan makanan untuk dapur, restoran dan layanan kamar. Semakin besar volume semakin banyak yang dibutuhkan.
2. Hotel berbintang, terutama bintang empat dan lima cenderung menggunakan kualitas terbaik tertentu, sehingga mendorong sektor akomodasi dan makan minum untuk meningkatkan standar produksinya
3. Hotel sering menjadi mitra promosi bagi para pelaku usaha kuliner, baik melalui rekomendasi kepada tamu atau penyediaan produk oleh hotel.

2.1.5.3 Jumlah Restoran

Restoran merupakan usaha yang menyediakan makanan dan minuman siap saji untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, baik dalam skala besar maupun kecil. Menurut konsep statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, restoran mencakup seluruh usaha penyedia makanan dan minuman siap saji yang termasuk rumah makan, kafe, bar, kantin, dan jasa boga atau katering (BPS, 2024).

Jumlah restoran menjadi indikator penting karena mencerminkan ketersediaan fasilitas konsumsi bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Semakin banyak restoran yang tersedia, semakin besar kapasitas suatu daerah dalam

melayani kebutuhan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan sektor penyediaan makan minum dan berkontribusi terhadap PDRB.

Menurut konsep statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, restoran mencakup seluruh usaha penyedia makanan dan minuman siap saji yang melayani masyarakat umum, baik dalam skala besar maupun kecil. Jumlah restoran menjadi indikator penting karena mencerminkan ketersediaan fasilitas konsumsi bagi wisatawan. Keberadaan restoran tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri, terutama dalam wisata kuliner.

Dalam kaitannya dengan pariwisata, restoran memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan melakukan konsumsi makanan dan minuman sebagai bagian dari kebutuhan dasar selama perjalanan. Menurut Tribe (2011), pengeluaran wisatawan terhadap makanan dan minuman merupakan salah satu komponen penting dalam total pengeluaran wisata, sehingga peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong peningkatan permintaan terhadap restoran. Selain itu, pertumbuhan jumlah restoran juga mendorong peningkatan persaingan usaha, yang pada akhirnya memacu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan (Pine & Gilmore, 1999). Dengan demikian jumlah restoran dapat dijadikan indikator dalam menggambarkan sektor pariwisata, khususnya dalam sektor akomodasi dan makan minum. Karena semakin banyak jumlah restoran maka semakin besar pula potensi peningkatan kinerja sektor akomodasi dan makan minum disuatu daerah baik dari sisi produksi, distribusi maupun konsumsi.

2.1.6 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan aspek fundamental yang memengaruhi perilaku konsumsi dan produksi dalam suatu perekonomian. Perubahan kondisi ekonomi akan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi serta keputusan pelaku usaha dalam menentukan tingkat produksi. Dalam teori ekonomi, tingkat pendapatan dan biaya produksi menjadi dua komponen utama yang menentukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Menurut Sukirno (2015), pendapatan masyarakat berperan sebagai determinan utama permintaan, karena mencerminkan daya beli yang dimiliki oleh individu maupun rumah tangga terhadap barang dan jasa.

faktor ekonomi difokuskan pada dua indikator utama, yaitu pendapatan per kapita dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pendapatan per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan konsumsi masyarakat, sedangkan UMK mencerminkan kebijakan upah yang memengaruhi biaya tenaga kerja dalam proses produksi karena mewakili sisi permintaan dan sisi penawaran dalam perekonomian. Landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh kedua variabel ini adalah Teori Hukum Engel, dan Teori Upah Minimum.

2.1.6.1 Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Indikator ini dihitung dengan cara membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk

di daerah tersebut (Todaro & Smith, 2011). Dengan kata lain, pendapatan per kapita mencerminkan besarnya nilai output ekonomi yang tersedia per orang. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita, semakin besar rata-rata daya beli masyarakat, yang berarti kemampuan untuk membeli barang dan jasa, termasuk makanan dan minuman, juga semakin tinggi. Sebaliknya, pendapatan per kapita yang rendah mengindikasikan daya beli yang terbatas.

Hukum Engel yang dikemukakan oleh Ernst Engel (1857) menjelaskan hubungan antara pendapatan dan pola pengeluaran konsumsi, khususnya untuk pangan. Berdasarkan hasil observasinya terhadap rumah tangga di berbagai tingkat pendapatan, Engel menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin kecil pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi pangan. Namun, yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa meskipun proporsinya menurun, nilai absolut dari pengeluaran untuk makanan dan minuman justru meningkat. Hal ini berarti bahwa ketika pendapatan masyarakat naik, mereka tidak serta merta mengurangi belanja makanan; sebaliknya, mereka cenderung membeli makanan dengan kualitas yang lebih baik, lebih bervariasi, dan lebih sering mengonsumsi di luar rumah.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan per kapita secara teoretis akan mendorong peningkatan konsumsi terhadap jasa akomodasi dan kuliner, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDRB sektor akomodasi dan makan minum.

2.1.6.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan standar minimum upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan

terhadap tenaga kerja. UMK berfungsi sebagai acuan dalam penentuan upah yang layak agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Dalam perspektif ekonomi, kebijakan upah minimum memiliki implikasi terhadap aktivitas konsumsi dan produksi dalam suatu perekonomian.

Teori Upah Minimum yang dikemukakan oleh N. Gregory Mankiw (2018) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum memiliki dua sisi dampak yang perlu diperhatikan secara simultan. Pertama, dari sisi konsumsi, peningkatan UMK akan meningkatkan pendapatan pekerja, terutama pekerja dengan upah di tingkat terbawah. Peningkatan pendapatan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat kelas pekerja. Maka peningkatan UMK akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, termasuk jasa akomodasi dan kuliner. kedua, dari sisi penawaran, kenaikan UMK meningkatkan biaya tenaga kerja, terutama bagi industri padat karya seperti hotel dan restoran. Namun, dampak negatif ini dapat dikompensasi oleh peningkatan permintaan agregat. Dalam jangka panjang, kebijakan upah yang stabil mendorong produktivitas tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum.

2.1.6.3 Keterkaitan Faktor Ekonomi dengan Akomodasi Makanan dan Minuman

Pendapatan per kapita dan UMK merupakan dua faktor ekonomi yang memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman. Pendapatan per kapita berperan dalam meningkatkan permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat, sedangkan UMK memengaruhi

penawaran melalui perubahan biaya produksi. Interaksi antara kedua faktor ini akan menentukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam industri.

Dalam konteks penelitian ini, peningkatan pendapatan per kapita diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat terhadap jasa hotel, restoran, dan kafe, sehingga meningkatkan PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Engel, 1857). Sementara itu, perubahan UMK dapat memberikan dampak ganda. Di satu sisi, kenaikan UMK meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong permintaan terhadap jasa tersebut (Mankiw, 2018). Di sisi lain, kenaikan UMK juga dapat meningkatkan biaya operasional usaha hotel dan restoran, yang berpotensi menekan margin keuntungan.

Namun, peningkatan permintaan agregat yang terjadi bersamaan diharapkan dapat mengompensasi kenaikan biaya produksi, sehingga secara keseluruhan UMK tetap memberikan pengaruh positif terhadap PDRB sektor ini. Dengan demikian, secara teoretis pendapatan per kapita dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diduga berpengaruh positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y) di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

2.1.7 Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, hubungan antara sektor pariwisata dan faktor ekonomi terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum dapat dijelaskan secara sistematis. Sektor pariwisata yang diwakili oleh jumlah wisatawan (X1), jumlah hotel berbintang (X2), dan jumlah restoran (X3) secara teoretis berpengaruh positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y). Peningkatan jumlah wisatawan mendorong permintaan langsung

terhadap jasa akomodasi dan kuliner karena setiap wisatawan membutuhkan tempat menginap dan makanan selama perjalanan (Tribe, 2011). Permintaan ini selanjutnya mendorong peningkatan jumlah hotel dan restoran sebagai respons pelaku usaha terhadap peluang pasar. Peningkatan jumlah hotel menciptakan permintaan turunan (*derived demand*) terhadap tenaga kerja, bahan baku, dan jasa pendukung, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah sektor tersebut (Antara & Sumarniasih, 2017).

Demikian pula, peningkatan jumlah restoran meningkatkan kapasitas konsumsi kuliner, yang secara langsung menyerap permintaan wisatawan dan masyarakat lokal serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan (Pine & Gilmore, 1999). Dengan demikian, secara simultan, ketiga variabel pariwisata ini berkontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Selain itu, faktor ekonomi yang diwakili oleh pendapatan per kapita (X4) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (X5) juga secara teoretis berpengaruh positif terhadap Sektor akomodasi dan makan minum (Y).

Hukum Engel (Engel, 1857) menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan nilai absolut konsumsi makanan dan minuman, serta mendorong masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi jasa di luar rumah (restoran dan hotel). Peningkatan pendapatan juga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap jasa akomodasi, sehingga permintaan terhadap hotel dan restoran meningkat. Sementara itu, (Mankiw, 2018) menjelaskan bahwa kenaikan UMK meningkatkan pendapatan pekerja kelas bawah yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi (*high marginal propensity to consume*), sehingga

permintaan terhadap jasa akomodasi dan kuliner ikut meningkat. Meskipun kenaikan UMK dapat meningkatkan biaya operasional usaha hotel dan restoran, peningkatan permintaan agregat yang terjadi bersamaan diharapkan dapat mengompensasi dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, UMK diduga memberikan pengaruh positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum.

Dengan demikian, kelima variabel independen (jumlah wisatawan, jumlah hotel berbintang, jumlah restoran, pendapatan per kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang saling terkait dalam memengaruhi PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong peningkatan jumlah hotel dan restoran, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas sektor untuk menghasilkan output. Di sisi lain, peningkatan pendapatan per kapita dan UMK akan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap jasa akomodasi dan kuliner meningkat.

Kombinasi antara peningkatan kapasitas produksi (dari hotel dan restoran) dan peningkatan permintaan (dari wisatawan, pendapatan, dan upah) menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang memperkuat kinerja sektor akomodasi dan makan minum. Penelitian ini akan menguji secara empiris besarnya pengaruh masing-masing variabel independen tersebut, baik secara parsial maupun simultan, terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2021–2025.

2.1.7.1 Hubungan Jumlah Wisatawan Terhadap PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Jumlah wisatawan memiliki hubungan positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Berdasarkan *Tourism-Led Growth Hypothesis* (TLGH) yang dikemukakan oleh Balaguer & Cantavella-Jordá (2002), peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, termasuk jasa akomodasi (hotel) serta makanan dan minuman (restoran, kafe). Wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat membutuhkan tempat menginap dan konsumsi makanan selama perjalanan.

Semakin banyak wisatawan, semakin tinggi tingkat hunian hotel dan semakin ramai restoran, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan usaha di sektor tersebut. Peningkatan pendapatan ini secara langsung akan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Penelitian Irawan et al. (2023) di Jawa Barat membuktikan bahwa kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor makanan dan minuman.

2.1.7.2 Hubungan Jumlah Hotel Berbintang Terhadap PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Jumlah hotel berbintang memiliki hubungan positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menciptakan permintaan terhadap berbagai input, seperti tenaga kerja, bahan baku makanan, dan jasa pendukung lainnya. Dalam operasionalnya, setiap hotel membutuhkan

pasokan bahan makanan untuk dapur, restoran hotel, layanan kamar (*room service*), serta fasilitas *banquet* dan *catering*. Kebutuhan ini menciptakan permintaan turunan (*derived demand*) yang secara langsung meningkatkan pendapatan sektor penyediaan makan minum. Selain itu, peningkatan Jumlah hotel berbintang juga meningkatkan kapasitas akomodasi suatu wilayah, yang pada gilirannya mampu menampung lebih banyak wisatawan dan memperpanjang lama tinggal mereka.

Antara & Sumarniasih (2017) menyatakan bahwa peningkatan aktivitas pada sektor akomodasi secara langsung akan menstimulasi produktivitas sektor makanan dan minuman lokal. Dengan demikian, keberadaan hotel yang semakin banyak tidak hanya berkontribusi pada pendapatan sektor akomodasi itu sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor kuliner di sekitarnya. Temuan ini didukung oleh Garrido-Prada et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kapasitas akomodasi memperluas basis pendapatan daerah serta memperkuat fundamental ekonomi sektoral. Oleh karena itu, secara teoretis jumlah hotel berbintang (X2) diduga berpengaruh positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y) di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

2.1.7.3 Hubungan Jumlah Restoran Terhadap Kinerja Sektor Akomodasi

Makanan dan Minuman

Jumlah restoran memiliki hubungan positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Restoran merupakan ujung tombak konsumsi makanan dan minuman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, sehingga keberadaannya berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi dan nilai

tambah sektor penyediaan makan minum. Dalam kaitannya dengan pariwisata, wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan melakukan konsumsi makanan dan minuman sebagai bagian dari kebutuhan dasar selama perjalanan. Menurut Tribe (2011), pengeluaran wisatawan terhadap makanan dan minuman merupakan salah satu komponen terbesar dalam total pengeluaran wisata, sehingga peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong peningkatan permintaan terhadap restoran. Pine & Gilmore (1999) menekankan bahwa pengalaman kuliner telah menjadi bagian dari nilai ekonomi pariwisata, di mana wisatawan tidak hanya mencari makanan, tetapi juga pengalaman bersantap yang unik dan berkesan. Semakin banyak restoran, semakin besar pilihan kuliner bagi wisatawan, yang akhirnya dapat memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan pengeluaran mereka. Selain itu, persaingan antar restoran mendorong inovasi menu, peningkatan kualitas layanan, serta efisiensi operasional. Yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor penyediaan makan minum secara keseluruhan.

2.1.7.4 Hubungan Pendapatan Per kapita terhadap PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Pendapatan per kapita memiliki hubungan positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Teori Konsumsi Keynes (Keynes, 1936) menyatakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposabel. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya pada barang dan jasa, termasuk jasa akomodasi (hotel) dan kuliner (restoran, kafe).

Hukum Engel (Engel, 1857) memperkuat argumen ini dengan menjelaskan bahwa meskipun proporsi pengeluaran untuk pangan menurun seiring peningkatan pendapatan, nilai absolut konsumsi makanan dan minuman justru meningkat, dan masyarakat cenderung mengonsumsi produk dengan kualitas lebih baik, lebih bervariasi, serta lebih sering makan di luar rumah. Dengan kata lain, ketika pendapatan per kapita suatu wilayah meningkat, permintaan terhadap hotel, restoran, dan jasa kuliner lainnya akan ikut meningkat. Peningkatan permintaan ini akan mendorong peningkatan pendapatan usaha di sektor akomodasi dan makan minum, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor tersebut. Dengan demikian, secara teoretis pendapatan per kapita (X_4) diduga berpengaruh positif terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum (Y) di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Implikasi dari hubungan ini adalah bahwa kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat juga akan memperkuat kinerja sektor akomodasi dan makan minum secara berkelanjutan.

2.1.7.5 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kinerja Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan positif terhadap kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman. Teori Upah Minimum (Mankiw, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum memiliki dua sisi. Dari sisi konsumsi, peningkatan UMK meningkatkan pendapatan pekerja kelas bawah yang memiliki *Marginal Propensity to Consume* (MPC) tinggi, sehingga mendorong permintaan terhadap produk makanan dan minuman serta jasa akomodasi. Dari sisi penawaran, meskipun kenaikan UMK meningkatkan biaya

tenaga kerja dampak negatif ini dapat dikompensasi oleh peningkatan permintaan agregat. Penelitian Yulika (Yulika., 2022) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa variabel pariwisata dan akomodasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahwa kebijakan upah yang stabil dapat mendukung pertumbuhan sektor terkait. Dengan demikian, secara teoretis UMK berpengaruh positif terhadap kinerja sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh sektor pariwisata dan faktor ekonomi terhadap kinerja ekonomi daerah. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian ini, baik dari sisi metodologi, variabel yang digunakan, maupun hasil temuan yang diperoleh. dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, berikut disajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Tujuan dan Variabel	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
1	Rawosi, Z. B., & Widiani, I. N. W. (2025). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum di Provinsi Bali.	Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Bali. Variabel: Wisatawan, hotel dan restoran, rata-rata lama menginap, infrastruktur jalan.	Regresi Data Panel	Jumlah wisatawan, hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan.	Persamaan: Y sama (PDRB sektor akomodasi & makan minum); X1, X2, X3. Perbedaan: Lokus Bali, tidak mencakup pendapatan per kapita & UMK.
2	Sabrina, E. W., & Huda, S. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto.	Tujuan: Mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap PDRB DIY. Variabel: Jumlah wisatawan, akomodasi hotel, objek wisata, restoran dan rumah makan.	Regresi Data Panel	Wisatawan dan restoran berpengaruh positif tidak signifikan; akomodasi hotel dan objek wisata berpengaruh positif signifikan	Persamaan: X1 jumlah wisatawan, X2 jumlah hotel, X3 jumlah restoran. Perbedaan: Y PDRB agregat (bukan spesifik sektor), lokus DIY.
3	Sari, I. P. (2024). Analisis pengaruh jumlah hotel dan jumlah kedatangan penumpang pesawat terhadap PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Tujuan: Menganalisis pengaruh jumlah hotel dan kedatangan penumpang pesawat terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Variabel: Jumlah hotel, jumlah kedatangan penumpang pesawat.	Regresi data panel	Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor tersebut.	Persamaan: Y sama (PDRB sektor akomodasi & makan minum); X2 hotel. Perbedaan: Lokus Bangka Belitung, tidak mencakup wisatawan, restoran, pendapatan & UMK
4	Putri, R.A.(2021). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Jumlah Restoran Terhadap Sektor Pembentuk PDRB Pariwisata di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali Tahun 2015-2019.	Tujuan: Menganalisis pengaruh wisatawan, hotel, restoran terhadap sektor pembentuk PDRB pariwisata. Variabel: Jumlah wisatawan, hotel, restoran.	Regresi data panel	Jumlah wisatawan, hotel, restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB pariwisata.	Persamaan: Lokus Jawa Barat; X1 jumlah wisatawan, X2 jumlah hotel, X3 jumlah restoran. Perbedaan: Y adalah PDRB pariwisata agregat (bukan spesifik sektor).
5	Tampubolon, S. (2025). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2018-2023.	Tujuan: Mengkaji pengaruh sektor pariwisata terhadap PDRB di kabupaten/kota Jawa Barat. Variabel: Wisatawan, restoran/kafe, angkatan kerja, PAD sektor pariwisata.	Regresi data panel	Wisatawan dan restoran/kafe berpengaruh positif tidak signifikan. Angkatan kerja & PAD signifikan	Persamaan: Lokus Jawa Barat; X1, X3. Perbedaan: Y PDRB agregat (bukan spesifik sektor), periode 2018-2023.

6	Zain, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Per kapita dan Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Bukittinggi. Jurnal Menara Ekonomi	Tujuan: Menganalisis pengaruh pendapatan per kapita dan pariwisata terhadap perekonomian Kota Bukittinggi. Variabel: Pendapatan per kapita, jumlah wisatawan.	Regresi Linear Berganda	Pendapatan per kapita dan jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan	Persamaan: X1, X4. Perbedaan: Y PDRB agregat (bukan spesifik sektor), lokus Bukittinggi.
7	Wulandari, S., & Nugroho, B. (2023). Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Per kapita terhadap Nilai Produksi Restoran dan Hotel di Provinsi Jawa Barat.	Tujuan: Pengaruh wisatawan dan pendapatan per kapita terhadap nilai produksi restoran & hotel. Variabel: Wisatawan, pendapatan per kapita, nilai produksi restoran & hotel.	Regresi Linier Berganda	Wisatawan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap nilai produksi restoran & hotel.	Persamaan: X = wisatawan dan pendapatan per kapita. Perbedaan: Tidak memasukkan hotel & restoran sebagai X.
8	Liza Marie, A., & Widodo, R. E. (2020). Pengaruh Kunjungan Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Omzet Usaha Makanan dan Minuman di DIY.	Tujuan: Pengaruh wisatawan dan hunian hotel terhadap omzet usaha mamin. Variabel: Wisatawan, tingkat hunian hotel, omzet usaha mamin.	Regresi Berganda	Wisatawan dan hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap omzet usaha mamin.	persamaan: X = wisatawan & hotel. Perbedaan: Tingkat hunian hotel, bukan jumlah hotel. Lokus DIY.
9	Pratiwi, N., & Haryanto, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Per kapita dan Jumlah Wisatawan terhadap Konsumsi Makanan Olahan di Pasar Tradisional Jawa Barat.	Tujuan: Pengaruh pendapatan & wisatawan terhadap konsumsi makanan olahan. Variabel: Pendapatan per kapita, wisatawan, volume konsumsi makanan olahan.	Regresi Linier Berganda	Pendapatan per kapita dan wisatawan berpengaruh positif terhadap konsumsi makanan olahan.	Persamaan: X = pendapatan & wisatawan. Perbedaan: Tidak mengukur produksi langsung, hanya konsumsi.
10	Widiyanti, N., & Dewanti, D. S. (2017). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di DIY	Tujuan: Pengaruh jumlah hotel & restoran terhadap PDRB sektor perdagangan, hotel, restoran. Variabel: Jumlah hotel, restoran, PDRB sektor terkait.	Regresi Data Panel	Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor perdagangan, hotel, restoran.	Persamaan: Y = PDRB. Perbedaan: Lokus DIY, tidak mencakup wisatawan & faktor ekonomi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat beberapa celah penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen berupa PDRB agregat atau pendapatan regional, sementara studi yang secara spesifik menganalisis PDRB sektor akomodasi dan makan masih terbatas.

Kedua, penelitian yang mengintegrasikan kelima variabel independen (jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, pendapatan per kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) dalam satu model analisis terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum belum banyak ditemukan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, lokus penelitian di Provinsi Jawa Barat dengan karakteristik pariwisata dan sektor akomodasi yang unik masih perlu diperkuat dengan bukti empiris terkini pada periode pasca-pandemi (2021–2025). Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik pariwisata yang beragam, sehingga menghasilkan dinamika sektor akomodasi dan makan minum yang berbeda dengan daerah lain.

Keempat, penelitian yang secara spesifik menggunakan data panel kabupaten/kota di Jawa Barat dengan periode 2021–2025 untuk menganalisis pengaruh variabel pariwisata dan faktor ekonomi terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum belum banyak dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah-celah tersebut dengan mengintegrasikan kelima variabel independen dalam satu model analisis terhadap PDRB sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2025.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu, sektor pariwisata dan faktor ekonomi memiliki potensi dalam meningkatkan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong permintaan terhadap jasa akomodasi (hotel) dan makanan minuman (restoran, kafe), yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan usaha di sektor tersebut (Tribe, 2011). Hal ini sejalan dengan *Tourism-Led Growth Hypothesis* (TLGH) yang dikemukakan oleh Balaguer & Cantavella-Jordá (2002), yang menyatakan bahwa pariwisata berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran wisatawan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk akomodasi dan penyediaan makan minum. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin tinggi tingkat hunian hotel dan semakin ramai restoran, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDRB sektor tersebut.

Keberadaan hotel berfungsi sebagai penyedia kapasitas akomodasi sekaligus menciptakan permintaan turunan terhadap tenaga kerja dan bahan baku. Setiap hotel, terutama hotel berbintang, membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar untuk operasional dapur, restoran hotel, layanan kamar (*room service*), serta fasilitas *banquet* dan *catering*. Kebutuhan ini menciptakan rantai pasok yang melibatkan sektor pertanian (pemasok bahan baku), industri pengolahan (produk setengah jadi), dan sektor perdagangan (distribusi).

Selain itu, hotel juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari staf kebersihan, pelayan, koki, hingga manajer. Peningkatan jumlah hotel tidak hanya meningkatkan kapasitas akomodasi suatu wilayah, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Antara & Sumarniasih (2017) menyatakan bahwa peningkatan aktivitas pada sektor akomodasi secara langsung akan menstimulasi produktivitas sektor makanan dan minuman lokal. Dengan demikian, semakin banyak hotel yang tersedia, semakin besar potensi peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum.

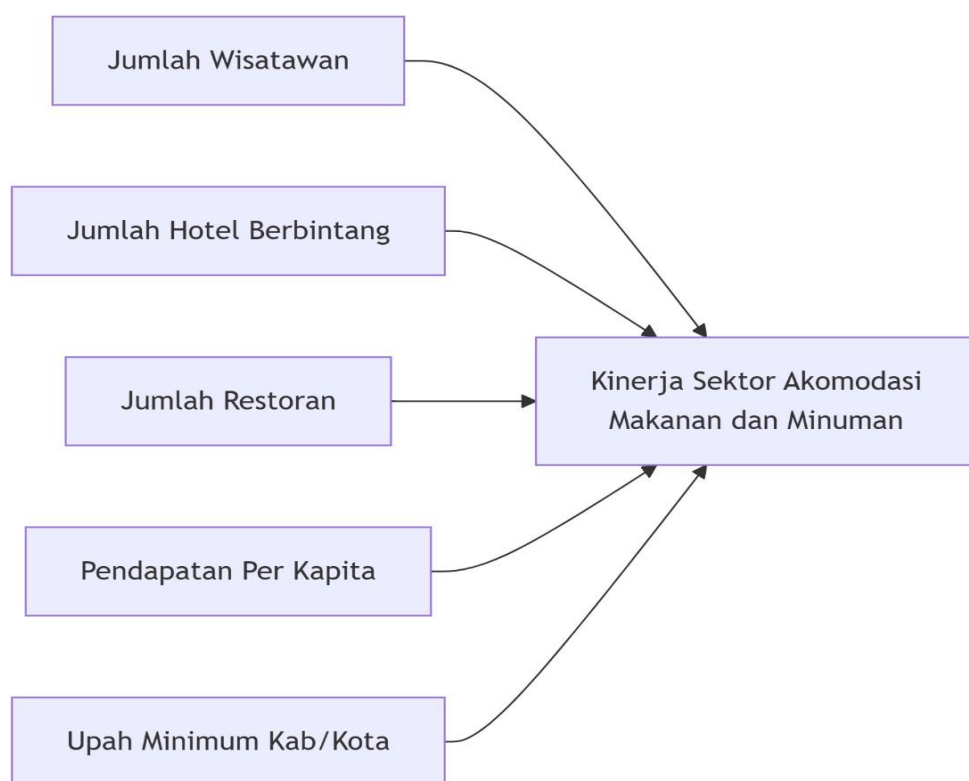
Bertambahnya jumlah restoran juga akan meningkatkan kapasitas konsumsi kuliner, menyerap permintaan wisatawan dan masyarakat lokal, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Restoran merupakan konsumen akhir dari produk pertanian dan industri pengolahan, sehingga peningkatan jumlah restoran akan meningkatkan permintaan terhadap bahan baku dari sektor hulu. Setiap restoran membutuhkan pasokan sayuran, buah-buahan, daging, ikan, bumbu, dan produk olahan lainnya.

Semakin banyak restoran, semakin besar volume penyerapan produk-produk tersebut. Selain itu, persaingan antar restoran mendorong peningkatan kualitas makanan, variasi menu, efisiensi operasional, dan standar kebersihan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap nilai tambah sektor penyediaan makan minum (Pine & Gilmore, 1999), wisata kuliner juga telah menjadi daya tarik tersendiri yang mendorong wisatawan untuk datang ke suatu daerah, sehingga peningkatan jumlah restoran dapat memperkuat daya tarik destinasi wisata dan memperpanjang lama tinggal wisatawan.

Sementara itu, dari sisi faktor ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita meningkatkan daya beli masyarakat terhadap jasa akomodasi dan kuliner. Hukum Engel (Engel, 1857) menjelaskan bahwa meskipun proporsi pengeluaran untuk pangan menurun seiring peningkatan pendapatan, nilai absolut konsumsi makanan dan minuman justru meningkat. Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung mengonsumsi produk dengan kualitas lebih baik, lebih bervariasi, dan lebih sering makan di luar rumah (restoran, kafe, hotel). Dengan demikian, peningkatan pendapatan per kapita secara langsung mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa akomodasi dan kuliner, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan usaha di sektor tersebut dan berkontribusi terhadap PDRB.

Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga memiliki peran penting. Teori Upah Minimum (Mankiw, 2018) menjelaskan bahwa kenaikan UMK meningkatkan pendapatan pekerja kelas bawah yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi (*high marginal propensity to consume*). Pekerja dengan pendapatan lebih tinggi akan mengalokasikan sebagian besar tambahan pendapatannya untuk konsumsi, termasuk untuk menginap di hotel dan makan di restoran. Meskipun kenaikan UMK dapat meningkatkan biaya operasional usaha hotel dan restoran, peningkatan permintaan agregat yang terjadi bersamaan diharapkan dapat mengompensasi dampak negatif tersebut. Dalam jangka panjang, kebijakan upah yang stabil dan terencana dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum secara

berkelanjutan. Dengan demikian, kelima variabel tersebut diduga memiliki hubungan positif dengan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian hubungan antar variabel di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

2. Jumlah hotel berbintang berpengaruh positif terhadap sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten kota Provinsi Jawa Barat.
3. Jumlah restoran berpengaruh positif terhadap sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten kota Provinsi Jawa Barat.
4. Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten kota Provinsi Jawa Barat..
5. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif terhadap sektor akomodasi dan makan minum di 27 kabupaten kota Provinsi Jawa Barat.

